

P

saputri

15030



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebrina Villa Saputi
NIM : C03215030
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak
Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor
544/Pid.B/2018/Pn.Sda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Pebrina Villa Saputri

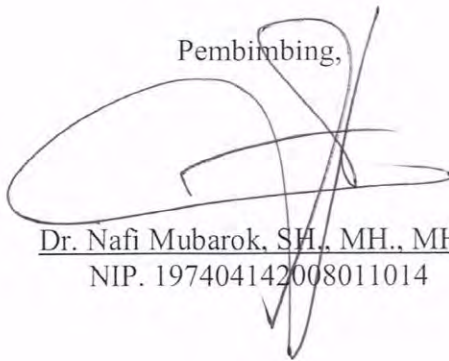
NIM. C03215030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda” yang ditulis Pebrina Villa Saputri NIM. C03215030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Pembimbing,



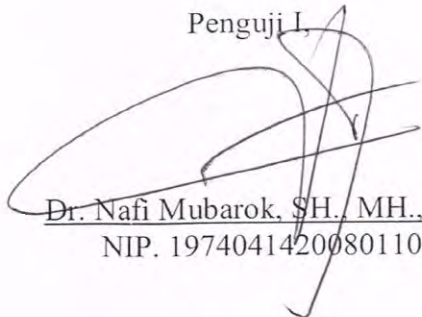
Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Pebrina Villa Saputri NIM. C03215030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

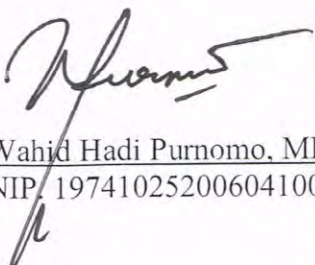
Penguji I,


Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI
NIP. 197404142008011014


Penguji II,


Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,


Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,


Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 23 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pebrina Villa Saputri
NIM : C03215030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : febrinavilla97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM

HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR

544/PID.B/2018/PN.SDA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

Penulis

(Pebrina Villa Saputri)

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda”. Menggunakan metode penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA? dan rumusan masalah yang kedua yaitu, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda?.

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012, berupa data sekunder yang merupakan bahan hukum primer. Kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan metode deduktif, untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda tentang tindak pidana pencurian, pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP. Akan tetapi sebenarnya terdapat unsur peringanan. Yakni pada nilai barang curian yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 700.000.-. Mengingat dalam tindak pidana pencurian mengenal adanya batasan minimal, yang disebutkan dalam pasal 364 KUHP *jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dan batas minimal tersebut Rp. 2.500.000.-. Maka fakta hukum dalam putusan, lebih cenderung memenuhi pasal 364 KUHP *jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, mengenal adanya pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*. Perbedaan antara keduanya terdapat pada nilai barang yang dicuri, didalamnya mengatur adanya batas minimal, sehingga menjadikan berbeda penjatuhan hukuman. Batas minimal tersebut adalah ¼ dinar, ¼ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham kurang lebih 3,36 gram emas. Jika dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 6.436.200. Selanjutnya dalam fakta-fakta persidangan, kerugian korban atau barang yang dicuri ditaksirkan senilai Rp. 700.000, sehingga berdasarkan fakta persidangan kerugian tersebut di bawah batas minimal dalam hukum pidana Islam yaitu ¼ dinar, maka lebih tepat dan sesuai hukumannya adalah *ta'zīr*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, dalam pemutusan pidana sudah menjadi keharusan bagi hakim untuk memperhatikan fakta-fakta dan sekaligus perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Mencermati unsur-unsur yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana yang sesuai dengan aturan.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL HALAMAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16

KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	16
A. Konsep Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	16
C. Konsep Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Islams	29
BAB III	32
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 544/Pid.B/2018/PN.SDA	32
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo	32
B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian Perkara Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo.	33
C. Pertimbangan Hukum Hakim	41
BAB IV	46
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 544/Pid.B/2018/PN.Sda TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	46
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	46
B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA. .54	54
BAB V	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

PENDAHULUAN

Definisi kejahatan menurut para ahli, salah satunya yang di kemukakan oleh Soesilo. ia menyebutkan bahwa definisi kejahatan ialah perilaku masyarakat yang melanggar undang-undang (yang selanjutnya disebut UU), perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik.¹

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah.²

Kejahatan penurian sering ditemui dalam keseharian. Banyak penyebab dalam kajian kriminologi, kondisi perekonomian keluarga salah satu dari timbulnya kejahatan pencurian. Pencurian tergolong dalam kejahatan terhadap harta benda, yang merupakan kejahatan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam

² Admin, "Pencurian", dalam <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 4 Juli 2019

menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.³

Demi memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus sebagai pemberantas terhadap kejahatan pencurian, maka hukum pidana positif mengatur tentang kejahatan pencurian. Secara rinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur pada BAB XXII tentang tindak pidana pencurian. Tepatnya dalam Pasal 362-367 KUHP antara lain: (1) Pasal 362 yang mengatur pencurian biasa, (2) 363 pencurian yang mengatur adanya hal pemberat, (3) 364 yang mengatur pencurian ringan, (4) 365 yang mengatur pencurian disertai kekerasan, dan (5) 367 yang mengatur pencurian dalam keluarga.⁴

Dengan penjelasan di atas, jenis pencurian dalam KUHP salah satu pasal 364 terkait pencurian ringan. Pencurian ringan masuk dalam jenis tindak pidana ringan. Di dalamnya terdapat batasan untuk seorang dapat dikenakan tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana dalam pasal 364 KUHP dijelaskan, bahwa barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp. 250,-).⁵

Melihat keadaan saat ini tentu saja batasan tersebut sudah tidak relevan. Sehingga hal tersebut yang menjadi latar belakang terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut PERMA) Nomor 2

³ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 129

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Akasa, 2014), 128-130

⁵ Ibid., 129

Agama Islam juga mengatur tentang hukum, yang tentu saja berfungsi sebagai keseimbangan sosial masyarakat atau kemaslahatan umat. Terkait pencurian, Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan jalan batil. *Sariqah* atau pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain.⁷

Keseimbangan sosial masyarakat atau kemaslahatan umat sangat diperlukan, untuk itu perlu diketahui bagaimana aturan pencurian dalam hukum pidana Islam, yang tentu saja berbeda dengan hukum pidana positif. Dalam hukum pidana Islam pencurian merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (*hadd*), sebagaimana Firman Allah SWT dalam alquran surat *Al-Mā'idah* ayat 38.⁸

Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana pencurian salah satunya dalam alquran:

⁸ Rusmiati, “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Jinayah*, vol. 1 (1), (April, 2017), 341

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan di atas sehingga penulis tertarik dengan putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA, untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA”.

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan, diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹² Berikut inilah penelitian hasil penelusuran penulis tentang tema tindak pidana pencurian:

1. Penelitian dari Fitrotul Umami dengan judul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/Pn.Sby)”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) pertimbangan hakim terhadap pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY, dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.¹³
2. Penelitian dari Arrizal Iftahul Haq dengan judul, “Studi Komparasi Antara Konsep *sāriqah* dalam Fikih Jinayah dengan pencurian dalam pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8

¹³ Fitrotul Umami “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor:607/Pid.B/2017/Pn.Sby)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 1-9

3. Penelitian dari Yanuar Arifin dengan judul, “Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) prosedur penahanan oleh penyidik terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, dan (2) akibat hukum penahanan terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk terkait PERMA Nomor 2 tahun 2012.¹⁵

Dengan memperhatikan uraian di atas, terdapat perbedaan antara fokus pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian penulis ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 362 KUHP pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B2018/PN.SDA, yang ditinjau dari segi hukum hukum pidana Islam.

¹⁵ Yanuar Arifin, "Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk)" (Skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012), 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Terselesainya penelitian ini maka akan berguna dalam berbagai aspek:

- ## 1. Bidang Teoritis

2. Bidang Praktik

yang terkait dengan kasus yang sama dapat menjalankan sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat tercapai keadilan yang menyeluruh dalam masyarakat.

G. Definisi Operasional

Agar pembaca tidak mengalami kesalah pahaman atas maksud penulis, maka penulis akan mendefinisikan atau menjelaskan setiap variabel dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA”. berikut ini penjelasannya:

1. Hukum pidana Islam, yaitu setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.¹⁶
2. Pertimbangan hukum hakim, menurut kamus besar bahasa indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruknya. Sedangkan hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruknya suatu putusan hakim.¹⁷

¹⁶ Airi Safrijal, “Pengertian Hukum Pidana Islam”, dalam https://www.academi.edu.com/11374170/PENGERTIAN_HUKUM_PIDANA_ISLAM, diakses pada 5 Juli 2019

¹⁷ Admin, “Pengertian Pertimbangan Hukum”, dalam <https://suduthukum/2016/12/peryimbangan-hukum.html>, diakses pada 5 Juli 2019

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/2018/Pid.B/PN.SDA
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian pada pasal 362-367
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Teknik pengumpulan data ialah teknik yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data.²¹

²¹ Fitrotul Umami, "Tinjauan Hukum Pidana ..., 9

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:²⁶

Bab II adalah landasan teori, yang berisi: (1) konsep tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, dan (2) konsep tindak pidana ringan dalam hukum pidana Islam.

Bab III data penelitian yang berisikan tentang: (1) deskripsi kasus, (2) Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), (3) tuntutan JPU, (4) putusan, dan (5) pertimbangan hakim.

²⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis ...*, 9-11

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian dan Klasifikasi

Pencurian (*sarīqah*) adalah mengambil harta terlarang bagi selain pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi.²⁷ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pencurian (*sarīqah*) memiliki dua macam, yaitu *sarīqah* yang diancam hukum *hadd* dan *ta'zīr*.²⁸

Dalam beberapa buku juga menyebutkan, *sarīqah* ialah bentuk masdhar dari kata سَرَقَ – يَسْرِقُ – سَرَقًا dan secara etimologis berarti

أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً mengambil harta milik seorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Ada beberapa juga definisi yang dikemukakan ahli:²⁹

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani.

Sariqah dalam syarat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta

²⁷ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudlah Madzahib Al A'immah*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), 143-144

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 100

²⁹ Ibid, 99-100

- Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syarak adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan dengan berbagai syarat.

- Sariqah* ialah mengambil harta orang lain dari tempat biasanya
diasimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

- Sariqah* ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *hadd* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang dikenakan *hadd* juga ada dua, yaitu *sariqah* kecil yang mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, dan juga *sariqah* besar yang mengambil harta disertai kekerasan ini juga dapat disebut sebagai perampokan.

be

ac
te

³¹ Ibid., 112

Ketika didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, di sini jika diklasifikasikan pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu; (1) pencurian dengan hukuman *ḥadd*, (2) pencurian yang hukumannya *ta'zīr*. Pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* adalah yang memenuhi syarat-syarat hukuman *ḥadd*, di dalam hal ini juga terdapat dua macam: (1) pencurian kecil, yaitu pencurian yang mewajibkan potong tangan, (2) pencurian besar, yaitu merampas harta dengan cara kekerasan atau biasa disebut *ghirabah* (perampokan).³² Sedangkan pencurian yang harus dita'zīr adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd*. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar.³³

2. Unsur-unsur Pencurian

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut: ³⁴

a. Pengambilan Secara Diam-diam

³² Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*,..., 501.

³³ Syaikh Musthafa Dicb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Depok: Fathan Media Prima. 2013), 318.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 83-88.

Dapat dikatakan mengambil barang perlu kita perhatikan tiga syarat berikut, yaitu:

- 1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat yang disimpan.
- 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
- 3) Barang yang dicuri dialihkan kepemilikannya ke dalam kekuasaan pencuri.

Seloh setu unsur untuk dikonekennye bul

Salah satu unsur untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri itu harus yang bernilai mal (harta). Apabila yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenakan hukuman *hadd*.

Mazhab al Arba'ah telah sepakat (konsensus, ijma), bahwa mencuri barang yang tidak berharga (tidak mempunyai nominal), tidak dikenakan sanksi potongan tangan, tapi mereka berbeda pendapat tentang maksud dari benda berharga itu.

Menurut Abu Hanifah, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya atau orang itu bisa bakhil (pelit) dengan sebab benda itu. Karenanya mencuri benda-benda yang dianggap remeh oleh adat, tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini telah disinyalir oleh Abdu al Qadir ‘Audah: Pada masa Rasulullah SAW, pencuri barang (benda) yang dianggap remeh (ringan) tidak dipotong tangannya.

³⁶ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah ...*, 510.

Menurut kesepakatan Ulama bahwa tempat penyimpanan harta dikategorikan kepada tiga macam, yaitu; (1) tempat penyimpanan harta yang berbentuk konstruksi (bangunan), seperti: rumah, toko, kandang bagi binatang dan seterusnya, (2) penyimpanan harta yang dijaga oleh diri sendiri seperti cincin yang sedang dipakai, (3) tempat yang bukan disediakan untuk menyimpan barang akan tetapi tempat itu bisa menjadi tempat penyimpanan jika ada yang menjaganya seperti menyimpan barang di lapangan terbuka, masjid dan seterusnya.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman potong tangan bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Yang dijadikan dasar hukum bahwa syarat harta yang dicuri itu sampai nisabnya adalah beberapa sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, dari Ibnu Umar dari Nabi

Jumhur Ulama telah sepakat adanya nisab pencurian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadarnya berikut ini menurut Ulama:

- ³⁸ Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. XV (April 2008), 244-247

اِذْرَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Satu dinar sama dengan 12 dirham, $\frac{1}{4}$ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3 dirham kira-kira 10,08 gram emas.⁴⁰ Jika 10.08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 6.436.200.⁴¹

⁴⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Oleh: Ikhwanuddin, dkk (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 983

Adapun orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *ḥadd* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan yang menjadi korban, karena hal itu juga dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan *shī'ah*. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *ḥadd* apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.

Adanya Niat yang Melawan Hukum.

Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyariatkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki

barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri.⁴³

3. Sanksi Bagi Pencuri

Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, termasuk pencuri.

Berikut ini sanksi bagi pencuri:

- a. Jika mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, maka dikenakan hukuman potong tangan.

Untuk itu dalam pemotongan tangan pencuri pun wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Pelaku pencuri adalah seorang mukalaf, berakal, dan balig.
- 2) Pencuri bukan ayah dari pemilik harta yang dicuri, bukan anaknya, dan bukan suami atau istrinya, karena masing-masing mereka mempunyai hak terhadap harta pemiliknya.
- 3) Pencuri tidak memiliki syubhat kepemilikan terhadap harta yang dicuri dalam bentuk syubhat kepemilikannya apa pun, misalnya ia mencuri barang yang ia gadaikan pada orang lain, atau ia mencuri barang yang ia sewa kepada orang lain.
- 4) Harta yang dicuri adalah harta yang diperbolehkan dimiliki, misalnya bukan *khamr* yang nilainya mencapai $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar.

⁴³ Ibid, 323

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Perbedaannya ketika di hukum *ḥadd* harta yang diambil memenuhi batas minimal) yang ditentukan yakni ¼ dinar, sedangkan pencurian harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat an *ḥadd*. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai n *ḥadd*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, nya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab tersebut

**DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 544/Pid.B/2018/PN.SDA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah Pengadilan Negeri berstatus 1A yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Sidoarjo yang meliputi dari 18 Kecamatan dan terdiri dari 325 desa. Pengadilan Negeri Sidoarjo beralamat di jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Kab. Sidoarjo tepat berada di depan perpustakaan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Visi pengadilan : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A Khusus yang Agung.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus.

**B. Deskripsi Kasus Tentang Pencurian Perkara Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo.**

1. Kronologi Kasus

Terdakwa berusia 66 tahun lahir pada 22 Agustus 1951, adalah seorang pekerja swasta hingga sekarang. Awal mula kejadian adalah sekira pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir sawah, Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda angin (pancal) merk phoenix warna merah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ⁵²

Pada saat terdakwa berjalan kaki di dekat pinggir sawah Dusun Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, Terdakwa melihat ada sepeda pancal merk phoenix warna merah yang di parkir di pinggir sawah di Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tanpa di kunci sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang.

Kemudian terdakwa melihat situasi sekitar yang sepi dan langsung mendekati sepeda tersebut, dengan menggunakan tangan kanan memegang sadel dan tangan kiri memegang setir sepeda sepeda

⁵² Putusan Pengadilan Sidoarjo Perkara Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda, 3-12

1) Saksi I

Kemudian di tengah jalan saksi II mengetahui bahwa itu sepeda milik istrinya, segera ia kejar untuk menangkap terdakwa, tak lama di jalan juga bertemusaksi III yang mengaku ketua RT setempat, lalu diminta juga untuk membantunya mengejar terdakwa untuk menangkapnya, kemudian juga beberapa warga mengetahui hal tersebut. Setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Prambon guna penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi

2) Saksi II

Saksi II adalah suami Korban yang menerangkan ketika itu sedang berjalan kemudian saksi mengetahui terdakwa menaiki sepeda angin yang diduga milik istrinya (Sumariyati), seketika saksi mengejanya dan tepat di tengah perjalanan saksi bertemu Pak RT (Sdr saksi III). Dari situlah diminta untuk membantu menangkap terdakwa , dengan suka rela Pak RT membantunya. Penangkapan terjadi tepatnya di dekat sekolah TK Dsn. Macean Desa Simpang Kec Prambon Kab. Sidoarjo.

Ketika terdakwa tertangkap, untuk memastikan barang bukti saksi pergi ke istrinya (saksi I). Benar apa yang diduga, sepeda milik istrinya tidak ada di tempat. Mengetahui hal tersebut, saksi II mengajak I untuk pergi ke tempat Pak RT yang sedang mengamankan terdakwa dan barang bukti, sekaligus memastikan barang bukti tersebut. Ketika diketahui bahwa sepeda tersebut benar miliknya, sehingga pada saat itu juga di laporkan ke Polsek Prambon guna penyidikan lebih lanjut. Saksi menyatakan bahwa terdakwa mengambil sepeda

Selanjutnya menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa juga menerangkan mengambil sepeda angin (pancal) tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan,

memegang sadel dan tangan kiri memegang setir sepeda , kemudian sepeda tersebut oleh Terdakwa di pakai dengan mengayunkan kedua kaki menempel pedal sepeda dan kedua tangan memegang setir sepeda angin (pancal). Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain. Terdakwa mengaku hasil curian tersebut akan di jual ke pasar Krian dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

Setelah berhasil mengambil sepeda angin (pancal) tersebut kemudian sepeda angin di naiki meliwati Dsn. Macean Desa Simpang Kec Prambon Kab. Sidoarjo dan tepat di tengah perjalanan terdakwa di perhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku Pak RT (saksi III) dan suami pemilik sepeda pancal, sehingga terdakwa diamankan dan di tangkap, kemudian saksi II pergi untuk mengecek kebenaran keberadaan sepeda tersebut, melihat terdakwa diamankan oleh Pak RT sendirian akhirnya berontak dengan melepaskan pegangan tangan pak RT dan Terdakwa berhasil lari. Menerangkan pada waktu itu berlari ke arah selatan menuju sawah, namun karena Pak RT dan masyarakat yang mengejar akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan Pak RT bersama masyarakat, selang beberapa menit Sdr II bersama istrinya (saksi I) datang dan menyatakan benar sepeda pancal

C. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah sepeda angin (pancal) merk phoenix warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sumariyati.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa yang melihat saksi II pergi tersebut berusaha melepaskan genggaman Pak RT dan berusaha lari ke arah selatan. Namun saksi III dan beserta warga menangkap kembali, kemudian saksi II datang bersama istrinya dan menyatakan sepeda angin (pancal) tersebut milik saksi I. Dari kejadian ini yang dirugikan adalah saksi I, dengan menyatakan kerugian sebesar Rp. 700.000.-.

Selanjutnya menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Barang Siapa

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik,

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa, Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00. WIB terdakwa telah mengambil sebuah sepeda angin (pancal) yang terparkir di pinggir sawah, Dusun Tangunan, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sumariyati.

Bahwa pada awalnya saksi Ipergi kesawah dengan menggunakan sepeda angin (pancal) dan setelah diparkir dipinggir sawah, tidak dikunci dan selanjutnya sepeda angin tersebut diambil oleh Terdakwa dan dinaiki. Setelah sampai di Sekolah TK, Dusun Macean,

⁶¹ Ibid, 14-15

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan telah dipenuhi oleh para Terdakwa.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda angin (pancal) milik saksi Sumariyati, sebelumnya tidak minta ijin terlebih dulu. Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan setelah itu untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan telah dipenuhi terdakwa. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362

KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan.⁶²

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, di
dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut keadaan yang
memberatkan.⁶³

1. Keadaan yang memberatkan bahwa dengan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

⁶² Ibid., 16

⁶³ Putusan Pengadilan Sidoarjo Perkara,..., 16

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 544/Pid.B/2018/PN.Sda
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan tindak pidana yang bersifat umum. Tindak pidana tersebut berupa pencurian biasa yakni pencurian sepeda angin (pancal) yang terparkir di pinggir sawah Dusun Tanggunan, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sumariyati, nilai atau harga sepeda angin tersebut ditafsir Rp.700.000,-, hal ini berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut umum (JPU) yang juga merupakan fakta persidangan.⁶⁴

⁶⁴ Ibid., 3-13

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

“barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

a. Unsur barang Siapa

⁶⁶ Ibid, 14-16

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

- b. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang yang dicuri berupa sepeda angin (pancal) yang terparkir di pinggir sawah Dunun Tanggunan, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sumariyati, nilai atau harga sepeda angin tersebut ditafsir Rp.700.000,-, berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda angin (pancal) milik saksi Sumariyati, sebelumnya tidak meminta izin terlebih dulu. Terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan kemudian untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan hal meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:⁶⁸

⁶⁷ Ibid, 16-17

- 1) Keadaan yang memberatkan bahwa dengan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 3) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis berpendapat yaitu:

1. Tidak adanya unsur peringanan pidana pada dakwaan maka terdakwa tidak dapat didakwa Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian biasa.
2. Berdasarkan fakta-fakta terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, karena tidak menjadikan kerugian korban sebesar Rp.700.000,- sebagai peringanan hukuman seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tidak memenuhi Pasal 362 KUHP pencurian biasa, melainkan memeluhui unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 364 pencurian ringan yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana. Misalnya

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo,..., 16

Pada prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan UU yang jelas bermakna bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multafsir sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Ketika hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya hakim melakukan proses pdengan membenturkan antara fakta dan aturannya, aturan ini dibangun oleh unsur-unsur perbuatan dilakukan terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pidana yang paling tepat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan Pasal 364 KUHP, karena barang yang dicuri oleh terdakwa jika

Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-undang, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang yang berlaku di Indonesia adalah:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Walaupun demikian tidak serta merta keberadaan PERMA dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebab kedudukan PERMA diatur tersendiri secara terpisah dalam pasal selanjutnya, pasal 8 ayat (1). Menyatakan bahwa:

Selanjutnya pada BAB II membahas soal denda yang tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 kali perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada pada Pasal 364 yaitu barang yang dicuri jika ditaksir kerugian dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak terbukti melakukan tindakannya pada pasal 362 KUHP. Meskipun sudah tepat perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 362 pencurian biasa, namun perbuatan terdakwa memiliki unsur meringankan dan unsur tersebut harus dipertahankan dan dijadikan sebagai bahan dasar pembuktian dan putusan.

Sebagai penguat dari analisis penulis, dibawah ini penulis paparkan beberapa contoh putusan kasus tindak pidana pencurian ringan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, dengan terdakwa Herman pgl Man 42 tahun yang di dakwa dengan Pasal

364 KUHP*jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang diputus dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari. Dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.⁷³

2. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pid.C/2014/PN.Kis, dengan terdakwa Bulan Sinaga 23 Tahun yang didakwa dengan Pasal 364 KUHP *jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dan diputus 2 (dua) bulan kurungan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.⁷⁴

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pid.C/2015/Pn.Sim, dengan terdakwa Miskiadi alias Misiadi 43 tahun yang didakwa Pasal 364 KUHP *jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dan diputus 2 (dua) bulan kurungan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.⁷⁵

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.

Bahwa dalam unsur pencurian khususnya adalah suatu hal yang penting, untuk itu apabila salah satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna. Otomatis yang terjadi ialah hukuman *ḥadd* bagi pencuri adalah potong tangan, tidak dapat dieksekusi pada pelaku.

Unsur pencurian dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:⁷⁶

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, 1, 4

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pid.C/2014/PN.Kis, 1, 7

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pid.C/2015/Pn.Sim, 1,3

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*...., 83-88

disebut pencurian kecil. Jika ada seorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meski demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman *ḥadd* tetapi hukuman *ta'zīr*.⁷⁷

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai pencurian besar, adapun yaitu pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Ketika didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, di sini jika diklasifikasikan pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu; (1) pencurian dengan hukuman *ḥadd*, (2) pencurian yang hukumannya *ta'zīr*. Pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* adalah yang memenuhi syarat-syarat hukuman *ḥadd*, di dalam hal ini juga terdapat dua macam: (1) pencurian kecil, yaitu pencurian yang mewajibkan potong tangan, (2) pencurian besar, yaitu merampas harta dengan cara kekerasan atau biasa disebut *hirabah* (perampokan).⁷⁸ Sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan

⁷⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*,..., 100-101

⁷⁸ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*,..., 501

Dapat ditemukan dalam Alquran sebagaimana Firman Allah SWT dalam alquran surat *Al-Mā'idah* ayat 38:

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah mahaperkasa lagi Mahanijaksana”. (*Al-Mā'idah*: 38).⁸⁰

Perbedaannya ketika dihukum *ḥadd* harta yang diambil memenuhi nisab (batas minimal) yang ditentukan yakni ¼ dinar, sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd*. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya

⁸⁰ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemah,..., 114

menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisabnya yaitu $\frac{1}{4}$ dinar.⁸¹

Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

اِذْرَوْا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : “Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih”

Satu dinar sama dengan 12 dirham, $\frac{1}{4}$ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3 dirham kira-kira 10,08 gram emas.⁸² Jika 10.08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 6.436.200.⁸³

Berdasarkan beberapa uraian yang penulis kemukakan di atas, maka hukuman bagi pencurian ringan adalah tidak dipotong tangan, sebab dalam unsurnya tidak memenuhi terhadap jumlah harta yang dibawah batas nisab. Batas nisab adalah salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya sanksi potong tangan, dalam hal ini ukuran batas minimal tersebut adalah $\frac{1}{4}$ dinar seperti pada hadis yang sudah disampaikan di atas.

⁸¹ M. Nurul irfan, Masyarofah, *Fiqih Jinayah...*, 99-100

⁸² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ... 983

⁸³ Admin, "Harga emas ... diakses pada tanggal 29 Juli 2019".

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 59

Dari berbagai uraian di atas terdapat beberapa saran yang penulis ajukan yaitu:

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2014. *Minhajul Muslim*, Terj. Oleh: Ikhwanuddin, dkk. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Bigha, Syaikh Musthafa Dieb. 2013. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Depok: Fathan Media Prima.
- Arifin, Yanuar. 2012. "Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk)". Skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofa. 2014. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Haq, Arrizal Iftahul. "Studi Komparasi Antara Konsep Sariqah dalam Fikih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Kau, Sofyan A. P.. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Kementrian Agama RI. 2007. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Sygma.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. XV, April 2008.

- Moeljatno. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Akasa.
- Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* No. 3, Vol. 16, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012.
- Rusmiati. “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”. No. 1, vol. 1, April 2017.
- Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid. 2007. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudlah Madzahib Al A’immah*. Jakarta: Pustakaazzam.
- Solar, Alvian. *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*. No.1, Vol. I, Januari-Maret, 2012.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Umami, Fitrotul. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor:607/Pid.B/2017/Pn.Sby)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Shalihah, Anifatul Septiana, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Skripsi—UII, Yogyakarta, 2018.
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Palanta.
- Admin, “Harga emas Hari ini” dalam, www.indogold.com, diakses pada tanggal 29 Juli 2019.
- Admin, “Pemeriksaan Perkara Pidana Acara Cepat” dalam, <http://pn-wonosobo.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-cepat.html>, diakses pada tanggal 20 juni 2019.

Admin, “Pencurian”, dalam <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 4 Juli 2019.

Admin, “Pengertian Kejahatan, Penyebab, dan Contohnya Lengkap”, dalam www.dosensosiologi.com diakses pada 4 Juli 2019.

Admin, “Pengertian Pertimbangan Hukum”, dalam <https://suduthukum/2016/12/pertimbangan-hukum.html>, diakses pada 5 Juli 2019.

Admin, “Visi Misi”, dalam, www.pn-sidoarjo.go.id di akses pada tanggal 24 Juni 2019.

Safrijal, Airi, “Pengertian Hukum Pidana Islam”, dalam https://www.academi.edu.com/11374170/PENGERTIAN_HUKUM_PIDANA_ISLAM, diakses pada 5 Juli 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nokor 80/Pid.C/2014/PN.Kis.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pid.C/2015/Pn.Sim.

Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk.